

Optimalkan Pembangunan Di Mahulu Asisten III Soroti Komitmen Perencanaan Anggaran



Sumber gambar : https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20231213_Jembatan-Datah-Suling-di-Mahulu.jpg

UJOH BILANG, TRIBUN – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kristina Tening, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam perencanaan anggaran yang berkualitas.

Ia menyebutkan bahwa keterlambatan dalam menyelesaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bisa berdampak pada hasil yang kurang maksimal.

Menurutnya, keterlambatan dalam menyelesaikan perencanaan anggaran sering kali membuat kualitas hasilnya tidak sesuai harapan.

Kristina menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya memiliki komitmen bersama dalam menyelesaikan RKA dan DPA tepat waktu agar dapat disampaikan Ke Bapeda tanpa tergesa-gesa.

“Barulah diselesaikan RKA, DPA-nya tadi untuk disampaikan atau diselesaikan dan dikirim kepada Bapeda ketika itu sudah mepet waktunya,” ucapnya. Keterlambatan dalam proses tersebut, lanjutnya, dapat buruk pada kualitas dokumen perencanaan.

Akibatnya, tujuan yang ingin dicapai dari program-program pembangunan juga tidak akan tercapai secara optimal. “Akhirnya isinya juga, hasilnya juga tidak bagus,” tuturnya.

Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang berdampak nyata dan dinilai berdasarkan efektivitas serta kualitas pelaksanaannya. “Nah, itu kan sangat berkontribusi sekali ya ketika nanti dinilai apa yang ingin dicapai,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga proses perencanaannya. Ia mengingatkan OPD bahwa membuat perencanaan yang baik merupakan hal yang prinsipil¹ dan harus menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

“Sementara itu menjadi hal yang penting dan prinsip yang juga akan dinilai bagaimana kita membuat suatu perencanaan atau kegiatan itu yang berdampak,” tegasnya. Ia juga menyinggung tantangan dalam pengusulan kegiatan oleh OPD yang sering kali sulit divisualisasikan dengan jelas, sehingga menghambat koordinasi antar pihak terkait.

Untuk mengatasi hal ini, ia berharap adanya percepatan dan solusi dari pihak terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Tata Laksana (Ortal), yang bisa berkoordinasi lebih baik dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK ID), sistem aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengusulkan kegiatan.

“Secepat mungkin atau dari Bappeda maupun Ortal bisa berkoordinasi dengan Simak ID bagaimana solusinya,” sebutnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Optimalkan Pembangunan di Mahulu Asisten III Soroti Komitmen Perencanaan Anggaran, 02/10/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (PP 6/2023), rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup RKA kementerian/lembaga, RKA Otorita Ibu Kota Nusantara, dan RKA bendahara umum negara.
2. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PP 6/2023 bahwa penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berbasis kinerja.
3. Dalam Pasal 10 ayat (1) PP 6/2023 diatur bahwa standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA dan/atau pelaksanaan anggaran terdiri atas:
 - a. standar biaya masukan;

- b. standar biaya keluaran; dan
- c. standar struktur biaya.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/prinsipiiil>, prinsipil adalah mengenai atau bertalian dengan prinsip (asas) yang terpenting.